

Eksplorasi Tantangan BPK Terkait Audit SDGs: Studi Kasus BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Gita Gusriantika^{1*}, Deviani²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: gitagusriantika00@gmail.com

Tanggal Masuk:

15 Maret 2024

Tanggal Revisi:

16 Juli 2024

Tanggal Diterima:

01 Agustus 2024

Keywords: *Audit; SDGs; Auditor BPK; Challenges; Opportunities.*

How to cite (APA 6th style)

Gusriantika, G., & Deviani. (2024). Eksplorasi Tantangan BPK Terkait Audit SDGs (Studi Kasus BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*. 6 (3), 1257-1275

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v6i3.1583>

Abstract

This research aims to find out how the highest audit institution in West Sumatera (BPK) applies various strategies to audit SDGs implementation and the challenges they face (Case Study of BPK Representative of West Sumatra Province). This research is research with a qualitative approach using phenomenological research. This research looks at and listens more closely and in detail to individual explanations and understanding of their experiences and explores meaning through exploring the experiences of the subjects studied. Researchers in this study collected data through interviews with BPK auditors for West Sumatra Province. The results of the research state that BPK auditors have understood the potential challenges that exist, but have not been able to maximize SDGs audit performance, especially in the field of poverty. There is still little research regarding SDGs Audit Challenges carried out by BPK auditors. And researchers conducted research in the West Sumatra Province area, where in this area the research carried out by researchers was something new. This research has a contribution, namely that based on the research results, it can pay attention to strategies in auditing the implementation of SDGs, especially in the field of poverty, and can be an inspiration for anyone to carry out similar research.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

PBB meluncurkan tujuan pembangunan *Millenium (MDGs)* ditetapkan untuk mengatasi hambatan utama dalam proses pembangunan dan mengurangi kemiskinan secara global pada tahun 2015. Meskipun sebagian tujuan tersebut telah tercapai, dalam “rencana pembangunan setelah tahun 2015”, PBB mengumumkan 17 *Sustainable Development Goals (SDGs)* untuk meningkatkan kesejahteraan, dengan kalimat *leave no-one behind* (Cordery, 2022). Tahun 2015, negara-negara anggota PBB mengadopsi agenda 2030, yang mencakup

Sustainable Development Goals (SDGs) (PBB M. U., 2015). Pemimpin dunia secara resmi menyetujui agenda *SDGs* sebagai kesepakatan yang berlaku secara global untuk pembangunan.

SDGs terdiri dari rangkaian 17 tujuan dengan 169 sasaran, yang mencakup seluruh isu pembangunan berkelanjutan yaitu agenda global untuk periode 15 tahun ke depan mulai dari 2016 hingga 2030, yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan menjaga lingkungan. Tujuan-tujuan ini bersifat universal yang berlaku untuk semua negara, apapun kondisi perkembangannya, dengan begitu semua negara tanpa terkecuali memiliki tanggung jawab moral agar mencapai tujuan dan sasaran *SDGs*. *SDGs* perlu memiliki kapasitas untuk mengatasi dua aspek utama; keadilan prosedural, yang menunjukkan seberapa jauh semua pihak khususnya mereka yang sebelumnya tertinggal dapat ikut serta dalam seluruh perkembangan pembangunan; dan keadilan substansial, yang menyoroti seberapa efektif kebijakan dan program pembangunan dalam menanggapi masalah-masalah yang dihadapi oleh warga, terutama kelompok-kelompok yang tertinggal.

Beberapa riset akuntansi tentang SDG yang lain seperti SDG-15 pada *Framing sustainable development challenges: accounting for SDG-15 in the UK* (Sobkowiak, 2020) yaitu penyusunan laporan keanekaragaman hayati tahunan pemerintah Inggris bergantung pada data yang dikumpulkan melalui upaya konservasi non-pemerintah, keahlian statistik dari kelompok proyek kecil di dalam pemerintahan, dan struktur pemerintahan yang mendorong evolusi berkelanjutan dari indikator-indikator tersebut seiring dengan upaya para aktor untuk menjadikannya berguna dalam perumusan kebijakan. Analisis ini mempermasalahkan pendekatan *SDG* dalam memperhitungkan pembangunan berkelanjutan, yang mana indikator-indikator kinerja telah disepakati secara terpusat dan diberlakukan secara universal kepada semua pemerintah yang menandatangani. Analisis ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kapasitas pemerintah pusat mungkin perlu lebih luas dibandingkan dengan apa yang digambarkan dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Selanjutnya, SDG-13 pada *SDG 13 and the entwining of climate and sustainability metagovernance: an archaeological-genealogical analysis of goals-based climate governance* (Charnock, 2020) yaitu penelitian ini menunjukkan bagaimana pendekatan arkeologi-silsilah dapat mulai mengatasi tantangan pengukuran dan pelaporan yang dihadapi metapemerintahan iklim dan *SDG*. Hal ini juga menyoroti bahwa target dua derajat perubahan iklim mempunyai interpretasi yang beragam dan menunjukkan betapa karakteristik ini menjadi sangat penting dalam operasionalisasi *metagovernance* iklim dengan cara yang menghormati kedaulatan negara-negara berkembang.

Lembaga audit tertinggi (SAI) menjalankan fungsi sentral dalam system akuntabilitas pemerintah. Dalam hal ini, lembaga audit tertinggi di Indonesia yaitu BPK. Umumnya bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik dan meningkatkan kinerja lembaga pemerintah (Titsworth, 2006). BPK dengan mandat, independensi, dan kapasitas yang sesuai menghasilkan informasi dan evaluasi yang relevan mengenai kekuatan & keterbatasan lembaga, proses dan kebijakan pemerintah. Sobkowiak (2020), memberikan wawasan terkait akuntansi pemerintah (tingkat nasional) dan akuntabilitas kinerja terhadap indikator-indikator spesifik yang mendukung pencapaian target dalam satu *SDG*, wawasan mereka mengenai kerangka ruang-ruang yang dapat dihitung terkait *SDGs* kemungkinan akan berguna dalam memahami bagaimana organisasi dapat mengembangkan perhitungan terkait *SDGs* yang efektif.

Fenomena yang dapat dilihat dari beberapa artikel sebelumnya yaitu ditemukan akuntansi belum siap dalam menghadapi *SDGs* dan belum banyak yang melakukan penelitian terkait *SDGs* maupun audit *SDGs* (Bebbington, 2020; Bebbington, 2017). Bebbington (2020), menemukan bahwa meskipun *SDGs* menonjol dalam dunia kebijakan dan kegunaannya

dalam membentuk pemahaman tentang tanggung jawab organisasi, para pakar akuntansi masih kurang terlibat dalam penelitian yang bermotif *SDGs*. Hal ini menimbulkan dua permasalahan. Pertama, ilmu akuntansi kurang tersedia dalam jaringan pengetahuan yang sedang dikembangkan tentang bagaimana mewujudkan ambisi *SDGs*. Kedua, ilmu akuntansi tidak berkembang dengan cara yang mencakup tantangan terkait *SDGs* yang dihadapi organisasi. Penelitian akuntansi mengenai *SDGs* berada pada tahap awal pengembangan, meskipun hampir beberapa tahun telah berlalu sejak penerapan resminya serta relatif sedikit penelitian yang pada saat itu memiliki waktu yang cukup untuk melakukan serangkaian penelitian inovatif mengenai peran dan potensi akuntansi dalam kaitannya dengan *SDGs*. Bebbington (2017), juga menemukan bahwa *SDGs* ini adalah makalah pertama yang mengeksplorasi peran akuntansi akademis dalam memajukan pencapaian *SDGs* melalui peningkatan pemahaman, kritik dan kemajuan kebijakan, praktik dan teori akuntansi. Ini juga merupakan makalah pertama yang mengusulkan agenda penelitian di bidang ini.

Setelah melakukan survey ke BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ternyata sejauh ini hanya melakukan pemeriksaan terkait dengan tujuan *SDGs-1* yaitu tanpa kemiskinan, artinya baru satu audit terkait *SDGs* yang dilakukan yaitu audit *SDG-1* dari 17 *SDG* yang ada. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Provinsi Sumatera Barat hingga Tahun Anggaran 2023 belum pernah melakukan pemeriksaan khusus *SDGs*. Sejalan ini, BPK Perwakilan melakukan pemeriksaan yang memiliki substansi yang berkaitan dengan *SDGs*, contohnya pemeriksaan atas isu kemiskinan. Pemeriksaan khusus terkait *SDGs* merupakan objek pemeriksaan Auditorat Keuangan Negara II di BPK Pusat. Salah satu isu strategis pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam RPJMD tahun 2017-2021 adalah tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan masih adanya daerah tertinggal. Dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di seluruh negara, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat masih lebih tinggi.

Dalam masa proses audit, BPK melaksanakan pemeriksaan, tanggung jawab pemeriksa melibatkan perencanaan, pengumpulan bukti pemeriksaan, serta pengembangan hasil temuan pemeriksaan, dan supervise (Pernyataan Standar Pemeriksaan 200). BPK melakukan dua pendekatan terkait *SDGs*, yakni pendekatan *dedicated* dan *embedded*. Ini mencakup tahapan pemeriksaan yang diperlukan serta metode pemeriksaan yang dipertimbangkan dalam konteks pemeriksaan terkait *SDGs*. Bentuk lain yang dilakukan oleh BPK adalah dengan melakukan tinjauan VNR (*Voluntary National Reviews*), mengumumkan laporan keberlanjutan, memulai pembentukan SAI20, serta mendirikan Unit Koordinasi Sentral untuk *SDGs* (Survey BPK).

Tujuan pembangunan berkelanjutan 1 (yang disebut *SDG 1*), tanpa kemiskinan, sebagai tantangan mendasar pembangunan berkelanjutan. Riset terdahulu dilakukan di Costa Rica yang telah melakukan audit terhadap pengentasan kemiskinan (*SDG 1*) (Costa Rica SAI, 2018). Lembaga Audit Tertinggi Costa Rica, berkoordinasi dengan Inisiatif Pengembangan (IDI) Organisasi Internasional Lembaga Audit Tertinggi (INTOSAI), melaksanakan audit kinerja pada tahun 2016 untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi "*Bridge to Development (BTD)*", sebuah strategi nasional yang dirancang untuk merawat keluarga-keluarga yang berada dalam kemiskinan ekstrem. Dengan meningkatnya penekanan pada audit implementasi *Sustainable Development Goals (SDGs)*, audit terkoordinasi ini lebih dari sebelumnya, memiliki arti penting karena membahas *SDG 1: Tanpa Kemiskinan*. (Costa Rica SAI, 2018)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wilayah Sumatera Barat melakukan audit berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Pedoman pemeriksaan yang diterapkan adalah Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar ini mengamanatkan BPK untuk merencanakan dan menjalankan pemeriksaan dengan tujuan mendapatkan keyakinan yang memadai mengenai kinerja entitas.

BPK percaya bahwa pemeriksaan tersebut memberikan landasan yang memadai untuk mengidentifikasi temuan pemeriksaan, serta menyusun simpulan dan rekomendasi.

Alasan pemeriksaan *SDGs* yang dilakukan BPK karena Renstra (Rencana Strategis) BPK Tahun 2020-2024 menjabarkan proses penyelarasan topik pemeriksaan dengan prioritas pembangunan yang ditekankan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2020-2024 dilakukan dengan memperhitungkan pelaksanaan tujuan *SDGs* di setiap agenda pembangunan. Untuk memperbaiki dan meningkatkan kerja sama dengan semua pihak yang terlibat dalam *SDGs* di Indonesia dengan mengadakan suatu akuntabilitas yang mengupayakan penilaian terhadap pelaksanaan pencapaian aktivitas *SDGs* dan kinerja pihak-pihak terkait dengan tanggung jawab yang baik. Untuk itu peningkatan akuntabilitas dapat membantu perbaikan tata kelola menjadi hal penting dalam pencapaian *SDGs*. Saat ini, salah satu isu strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2017 – 2021 adalah tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan masih adanya daerah tertinggal. Apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di seluruh negara, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat lebih tinggi.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Sustainable Development Goals

SDGs merupakan serangkaian 17 sasaran yang terdiri dari 169 target yang mencakup seluruh isu pembangunan berkelanjutan adalah agenda global untuk periode 15 tahun ke depan (mulai dari 2016 hingga 2030) yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan menjaga lingkungan. *SDGs* terdiri dari 17 tujuan yang berkaitan dengan hasil sosial, ekologi dan ekonomi. Mereka “berfungsi sebagai pedoman bagi transisi yang sulit menuju pembangunan berkelanjutan” (Le Blanc, 2015). Seluruh 193 Negara Anggota PBB telah berkomitmen untuk menuju pencapaian *SDGs* pada periode 2030 (PBB, 2016).

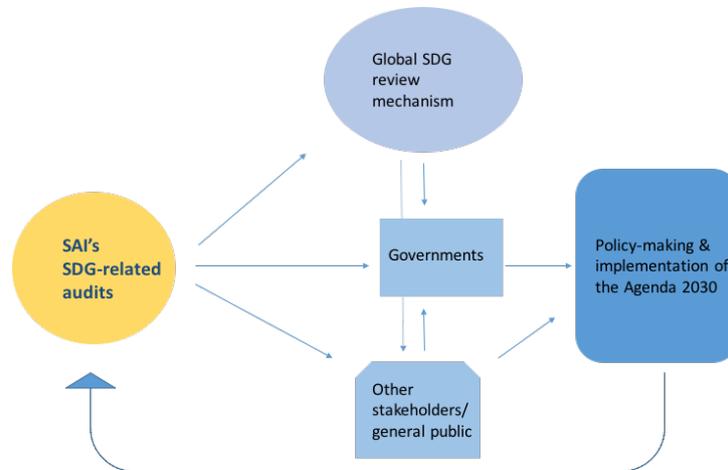
Tabel 1
Ringkasan Sustainable Development Goals (SDGs) PBB

Nomor	Deskripsi Garis Besar
1.	Tanpa Kemiskinan Akhir kemiskinan dalam berbagai bentuknya dimana pun
2.	Tanpa Kelaparan Menghentikan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi serta mempromosikan pertanian yang berkelanjutan
3.	Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik Menyediakan kondisi kesehatan dan kehidupan yang baik serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh individu dari berbagai rentang usia.
4.	Pendidikan Berkualitas Menjamin pendidikan berkualitas yang inklusif, adil dan mendukung peluang pembelajaran seumur hidup bagi semua individu
5.	Kesetaraan Gender Meraih pemerataan gender dan memberikan kekuatan seluruh perempuan serta anak perempuan

6.	Air Bersih dan Sanitasi Layak Menjamin air dan sanitasi yang terus menerus tersedia dan dikelola untuk kepentingan setiap orang
7.	Energi Bersih dan Terjangkau Menjamin semua orang memiliki akses yang terjangkau ke sumber daya energi, andal, berlanjut serta terbaru.
8.	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara terus menerus, inklusif serta terus berlanjut, menciptakan peluang pekerjaan yang produktif dan penuh serta pekerjaan yang memenuhi standar bagi seluruh individu
9.	Industri, Inovasi dan Infrastruktur Mengembangkan prasarana yang tangguh, memotivasi pertumbuhan sektor yang merangkul semua pihak dan terus berlanjut, serta mendorong inovasi
10.	Mengurangi Ketimpangan Menyusutkan ketimpangan pendapatan di dalam maupun antar negara
11.	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan Menjadikan perkotaan serta tempat tinggal inklusif, terlindungi, berketahanan dan terus berlangsung
12.	Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan Memastikan model penggunaan dan pembuatan yang berlanjut
13.	Aksi Iklim Melakukan langkah-langkah cepat untuk melawan perubahan iklim dan konsekuensinya dengan mengontrol emisi dan mempromosikan pembangunan sumber energi terbarukan
14.	Kehidupan Di Bawah Air Melestarikan serta memanfaatkan kekayaan alam samudera, lautan, serta kelautan secara terus menerus untuk mencapai pembangunan yang berlanjut
15.	Kehidupan di Darat Menjaga, mengembalikan serta mendorong pemanfaatan lingkungan hidup darat dengan cara yang terus menerus, mengatur hutan secara lestari, menanggulangi penggurunan, serta upaya untuk mengakhiri serta mengatasi penurunan kualitas lahan untuk mengakhiri kehilangan keragaman kehidupan
16.	Perdamaian, Keadilan dan Institusi yang Kuat Memacu terbentuknya masyarakat yang sejahtera dan merangkul semua orang dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan, memberikan kesempatan yang setara terhadap pemerataan hak dan kesempatan individu serta mendirikan lembaga-lembaga yang efisien, transparan, dan melibatkan semua pihak
17.	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Meningkatkan alat pelaksanaan serta membangkitkan kembali kerjasama internasional untuk mencapai pembangunan berkelanjutan

(Sumber: *Bebington, 2017*)

Dampak Audit SDG terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Implementasi SDG



Gambar 1. Mekanisme dampak audit BPK terkait SDG

(Sumber: Montero, 2019)

Audit *SDG* yang dilakukan oleh BPK dapat berdampak melalui beberapa saluran, sebagai berikut:

- Penggunaan audit oleh pemerintah sendiri untuk memperbaiki proses, struktur dan program implementasi *SDG* dengan menerapkan rekomendasi audit
- Penggunaan temuan audit dan informasi oleh pemangku kepentingan lainnya (badan legislatif, masyarakat sipil, masyarakat umum) untuk mendorong dan menginformasikan kegiatan mereka dalam mendukung implementasi agenda dan untuk menjaga akuntabilitas pemerintah atas inisiatif mereka dalam melaksanakan *SDGs*
- Menginformasikan proses tindak lanjut dan peninjauan *SDG* di tingkat global

Tantangan dan Kesempatan Audit SDG

Lembaga audit tertinggi menghadapi beberapa tantangan dan kesempatan terkait audit *SDG*. Tantangan-tantangan dan peluang-peluang ini diklasifikasikan berdasarkan isu-isu kelembagaan, teknik, politik, komunikasi dan kolaborasi. Hal ini didasarkan pada pengalaman nyata dengan program IDI dan inisiatif BPK lainnya yang sedang berjalan mengenai *SDGs*. Cara BPK mengatasi tantangan-tantangan ini dan memanfaatkan peluang yang mereka miliki akan mempengaruhi relevansi, kredibilitas dan legitimasi mereka dalam melakukan audit *SDG* dan apakah mereka akan mempunyai dampak positif dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap *SDGs* (Montero, 2019).

Tabel 2
Potensi Tantangan dan Risiko yang dihadapi BPK

Relevansi	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya kapasitas dan fleksibilitas BPK untuk menangani seluruh rangkaian <i>SDGs</i> dalam waktu yang terbatas • Audit <i>SDG</i> yang dilakukan BPK di anggap terlalu kritis terhadap tindakan pemerintah • Laporan dan temuan audit BPK tidak dikomunikasikan secara memadai kepada khalayak yang relevan • Audit BPK tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan transformatif
Legitimasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mandat BPK tidak mencakup audit kinerja • Audit <i>SDG</i> dirasakan oleh pihak-pihak diluar BPK untuk mengalihkan sumber daya dari usaha yang lebih penting • BPK dipandang telah keluar dari perannya dan menjadi pembuat kebijakan • Batasan yang tidak jelas dan hubungan dengan evaluasi kebijakan dan sejenisnya fungsi yang dilaksanakan oleh lembaga lain
Kredibilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kualitas laporan audit, mengakibatkan rendahnya penerimaan oleh auditee • Potensi perbedaan antara temuan audit dan evaluasi kebijakan lainnya, termasuk yang dilakukan di lingkungan pemerintah

(Sumber: Guillan Montero, 2019)

Kebijakan RPJMN Tahun 2020-2024 Terkait dengan SDGs

Menurut (Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, 2020) tujuan kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sejalan dengan *SDG* 1 yaitu Tanpa Kemiskinan dimana Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang relevan guna mengurangi kemiskinan diimplementasikan dengan menggunakan dua pendekatan utama, yakni mengurangi pengeluaran yang diarahkan melalui bantuan sosial dan meningkatkan pendapatan yang berasal dari program ekonomi yang produktif. Selain itu, kebijakan ekonomi secara keseluruhan menjadi persyaratan pokok guna mengurangi kemiskinan, termasuk menjaga kestabilan tingkat inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi memasukkan semua pihak, membuat peluang pekerjaan yang produktif, memelihara keadaan investasi serta peraturan perdagangan, meningkatkan kinerja sector pertanian dan prasarana di wilayah terpencil.

Implementasi Menggapai *Sustainable Development Goals* di Indonesia

Indonesia menetapkan ada 17 tujuan pembangunan dan 4 tujuan utama *SDGs*. Pertama, mengurangi kemiskinan. Kedua, mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan memperbaiki praktik pertanian berkelanjutan. Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi yang melibatkan semua pihak dan berlangsung terus menerus, serta menyediakan pekerjaan yang menghasilkan dan memadai bagi seluruh lapisan masyarakat. Keempat, mendirikan infrastruktur yang kuat, meningkatkan sektor industri yang melibatkan semua pihak dan berkelanjutan, serta memfasilitasi investasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut (Denzin K. N. Lincoln S.Y, 1994) studi kualitatif diarahkan pada pemahaman alamiah fenomena untuk menjelaskannya, dan melibatkan penerapan berbagai metode penelitian. Pada konteks penelitian ini, kita menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini adalah jenis penelitian kualitatif yang mendalami pengalaman individual secara rinci, memahami dan menganalisis penjelasan mereka tentang pengalaman-pengalaman mereka. Tujuan penelitian

fenomenologi adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam melalui penyelidikan pengalaman subjek yang diteliti.

Objek Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sebagai tempat penelitian karena BPK mempunyai posisi yang tepat untuk mengkritik, memantau, dan mengaudit rencana pemerintah yang telah dipersiapkan untuk mencapai *SDGs*. Penulis memilih lokasi tersebut untuk penelitian karena di sana terdapat subjek penelitian yang sesuai dengan karakteristik atau fokus penelitian yang ingin diteliti, dan penulis juga dapat dengan mudah mengakses informan kunci.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer yang berkaitan dengan fakta atau keterangan dari informasi yang disajikan dan menjadikan acuan dalam proses pengambilan keputusan. Peneliti mengumpulkan data primer melalui observasi dan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah auditor dari BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Saat melakukan pengamatan, peneliti melihat bagaimana lembaga audit tertinggi Sumatera Barat (BPK) menerapkan berbagai strategi untuk mengaudit implementasi *SDGs* dan tantangan yang mereka hadapi. Hasil observasi di dapat peneliti bahwa Auditor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menghadapi beberapa tantangan saat melaksanakan audit terkait *SDGs*.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah salah satu alat dalam metodologi pengumpulan data untuk peneliti kualitatif (Denzin N. K., 2009). Peneliti memperoleh informasi secara langsung melalui wawancara dari auditor di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang bersedia diwawancarai berjumlah 5 orang. Kriteria informan yaitu Auditor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang telah pernah mengaudit terkait *SDGs*. Metode dan analisis data wawancara pada penelitian ini bersifat interpretatif (menggunakan penafsiran) dalam menelaah masalah penelitian, dan juga menjabarkan berbagai metode dalam penggunaan metode kualitatif disebut dengan triangulasi. Hal ini dimaksudkan agar peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif (holistik) mengenai fenomena yang sedang diteliti.

Penelitian ini bersifat eksplorasi yang tidak membutuhkan kerangka teori karena untuk hasil penelitian yang bersifat eksplorasi memiliki informasi atau pengetahuan dari pengalaman subjek yang diteliti. Peneliti harus mampu mendeskripsikan pengalaman subjek dengan cermat, rinci, lengkap dan mendalam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penjabaran metode dan langkah-langkah yang dilakukan dengan merincikan secara eksploratif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih menggunakan metode ini dengan bahan pertimbangan bahwa fenomena yang diteliti termasuk fenomena yang membutuhkan penggunaan pengamatan serta observasi lebih dalam dan bukan menggunakan model angka atau statistik.

c. Dokumentasi

Keandalan hasil wawancara dapat diperkuat dengan adanya dukungan dari bukti-bukti seperti dokumen atau catatan. Data yang akan disimpulkan pada metode ini berasal dari literature dan bahan dokumen yang bersifat resmi baik ekstern maupun intern. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada bagian ikhtisar eksekutif tentang laporan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan tahun anggaran 2021 pada pemerintah provinsi Sumatera Barat.

Keabsahan Data

Data-data yang sudah terkumpul nantinya akan diuji dengan menggunakan empat kriteria yaitu kredibilitas, dipendabilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas hal ini dilakukan untuk menjamin keabsahan datanya.

a. Kredibilitas

Dalam penelitian kualitatif, keandalan data dapat dianggap terpenuhi ketika apa yang dilaporkan oleh peneliti sejalan dengan realitas yang terjadi pada objek penelitian.

b. Dipendabilitas

Dipendabilitas dilakukan untuk menjamin bahwa peneliti telah mendapatkan alat pendukung dari informasi data baik berupa pedoman tertulis, foto gambar ataupun rekaman suara. Semua alat pendukung ini nantinya dapat berguna agar data dapat diinterpretasikan dengan benar. Dan semua informasi data bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

c. Transferabilitas

Transferabilitas dilakukan jika semua pihak yang terkait seperti peneliti, pembaca dari hasil penelitian mempunyai pemahaman yang sama terhadap penelitian yang dilakukan.

d. Konfirmabilitas

Pemeriksaan yang dilakukan peneliti terkait pada hasil penelitian agar dapat melihat kesamaan antara temuan dan data yang sudah terakumulasi sebagai factor pendukung dan menjamin data yang terkumpul dianggap benar setelah mendapatkan konfirmasi dari narasumber dan elemen lain yang terlibat.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Keterbatasan dan Tantangan yang dihadapi Auditor Dilihat dari Sudut Pandang Kelembagaan BPK

Auditor BPK menyatakan bahwa mereka mempunyai pemahaman terhadap keterbatasan dan tantangan yang dihadapi Auditor adalah sebagai berikut:

“Memang terkait SDG-1 kita ada keterbatasannya dari segi kelembagaan dan sumber daya. Pengalaman yang pernah kita lakukan terkait pemeriksaan terutama SDGs ini kita memeriksa kinerjanya. Jadi pemeriksaan terkait SDGs ini kita menggunakan pemeriksaan kinerja. Pengalaman yang pernah dilakukan itu adalah pemeriksaan tematik pusat yang tidak hanya dilakukan disatu level perwakilan tetapi di beberapa level perwakilan dan juga ada semacam kelompok kerjanya yang melibatkan beberapa unsur-unsur diperusahaan. Terkait yang lebih spesifik mengenai SDG-1 ini terakhir dilakukan dikaitkan dengan pemeriksaan laporan keuangan di semester 1 tahun 2022. Kita jalannya simultan satu tim memeriksa laporan keuangan Pemerintah Provinsi dan satu tim lagi memeriksa kinerja penanggulangan kemiskinan. Tantangan kelembagaan ini lebih spesifik terkait sumber daya di personal maupun sumber daya terkait waktu dan berkaitan juga dengan keterbatasan kompetensi.”

“Saat ini pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam menanggulangi kemiskinan telah dilaksanakan sebaik mungkin. Pada tahun 2022 dalam pemeriksaan tentang SDGs 1 pernah kita jalankan dengan melakukan pemeriksaan yang tidak hanya berada dalam suatu perwakilan tetapi ada beberapa kelompok yang bekerjasama. Tantangannya saat ini adalah terkait dengan jumlah sumber daya auditor yang akan kita kerahkan.”

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan didapatkan beberapa informan telah mengetahui pemahaman tentang keterbatasan kelembagaan mempengaruhi kualitas dan jumlah audit yang dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh informan tersebut sering melakukan tindak audit dan juga merupakan lulusan Kriminologi dan Akuntansi.

Selain itu terdapat temuan lain yang diperoleh peneliti pada saat dilapangan yaitu, temuan mengenai umur Auditor BPK yang memiliki dampak terhadap pemahaman dalam menghadapi tantangan dalam mengaudit SDGs dengan cara yang lebih terorganisir.

“Cara mengatasi tantangannya dilakukan workshop dan melakukan kerjasama dengan badan diklat untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan konsep SDGs itu seperti apa, cara penanggulangan kemiskinan dalam cakupan provinsi maupun di tingkat nasional. Hal ini lebih ke internal, salah satunya kita mengadakan workshop, kita banyak diskusi, sharing, diklat, karena mau tidak mau kita harus memahami tantangan SDGs ini”

Salah satu informan menjelaskan tentang kerjasama dengan diklat bisa menjadi salah satu cara dalam mengatasi tantangan dalam mengaudit SDG dengan cara yang lebih berintegrasi. Perbedaan ini disebabkan perbedaan lama tahun bekerja dalam mengaudit SDG.

Pengalaman yang dimiliki seorang Auditor menjadi indikator yang sangat penting sekali apalagi jika harus melakukan sesuatu yang sangat penting seperti melakukan proses audit. Auditor yang memiliki pengalaman kurang dari 1 tahun biasanya cenderung kurang memahami dan masih dalam tahapan proses belajar, walaupun mereka memiliki semangat juang yang tinggi akan sangat berbeda sekali kinerja yang akan diperlihatkan apabila harus bertemu dengan seorang auditor yang memiliki pengalaman diatas 1 tahun. Hal ini juga diperjelas ketika ditanyakan tentang peran dan tanggung jawab BPK terhadap SDGs saat ini.

“Tentu saja besar, kita akan berusaha mengawal itu tetapi kita sampaikan SDGs itu mandatory (wajib) yang harus dilakukan dan diimplementasikan oleh pemerintah pusat melalui kegiatan dan program-program prioritas, kegiatan prioritas dan kegiatan pelaksanaan lainnya itu yang kita periksa. Kita fokus kesana dan kita berbicara tentang kinerja karena kita mengawal masalah kreativitas dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah misalnya pemerintah nasional dan provinsi sudah efektif atau belum yang mana tanggung jawab kita ada disana. Akhirnya, kita berusaha memberikan rekomendasi untuk perbaikan sehingga benar-benar terlaksana tujuan dari SDGs ini”

“Dibutuhkan peningkatan organisasi kegiatan kontribusi BPK dalam pencapaian SDGs, mulai dari perencanaan hingga pemantauan dan evaluasi. Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, sinergi, dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi pemerintah dan masyarakat, diperlukan tim lintas sektor atau pusat koordinasi SDGs yang dapat mengawal strategi pemeriksaan SDGs di BPK. Hal ini penting karena SDGs melibatkan sektor-sektor yang berbeda, dan koordinasi antar sektor harus optimal agar BPK dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam pencapaian SDGs.”

Melalui hasil wawancara, peneliti dapat mengambil kesimpulan pemahaman auditor BPK dengan struktur kelembagaan telah maksimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor temuan dilapangan yaitu karena informan auditor BPK memiliki jenjang pendidikan Akuntansi dan Kriminologi yang mampu membedah permasalahan dan tantangan yang harus

dihadapi oleh BPK. Lama tahun bekerja juga memberikan pertimbangan dalam memberikan saran dan jawaban mengenai tantangan BPK dalam struktur kelembagaan yang ada di dalam BPK.

Upaya Auditor BPK dalam Mengevaluasi Permasalahan dan Kepedulian Terhadap Pendidikan Profesional Bagi Seorang Auditor dilihat dari segi Teknis

Informan Auditor BPK menjawab bahwa mereka melakukan ukuran pemeriksaan dengan melihat sumber-sumber daya dan melakukan kegiatan yaitu kegiatan workshop. Hal ini dilakukan oleh auditor BPK karena mereka telah mengetahui tata cara dan telah memahaminya serta mampu mengolah data yang diterima sehingga hasilnya menjadi lebih valid.

“Terkait dengan teknis atau ukuran pemeriksaan yang kita lakukan memang kita ada indikator-indikator yang kita bangun yaitu kita komunikasikan dan diskusikan dengan pihak luar seperti akademisi dan entitas provinsi nanti kita akan sepakati bersama untuk kita jadikan indikator penilaian kita. Nah, inilah nanti yang kita nilai apakah sudah efektif atau belum, dan apakah perlu dilakukan perbaikan atas beberapa indikator yang belum tercapai. Apabila indikator yang kita sepakati memang pemerintah daerah sudah melakukan dan sudah terpenuhi maka itu menjadi sesuatu capaian positif. Jika misalnya memang belum, maka itu yang akan kita jadikan temuan pemeriksaan dan kemudian kita berikan rekomendasi maka indikator itu bisa terpenuhi”

“Kita akan mengadakan workshop yang berfokus membahas Pembahasan tentang pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Untuk itu, perlu diperhatikan dari tingkat organisasi BPK, yang mencakup pembentukan tim untuk melakukan audit SDGs, penentuan topik audit SDGs, pemilihan metode audit, pengembangan kapasitas profesional, pemanfaatan teknologi, kerjasama dengan lembaga yang ahli dalam SDGs, serta penyampaian dan implementasi SDGs secara internal maupun kepada pemangku kepentingan, serta tantangan dan harapan.”

Seorang auditor BPK selalu melakukan pemantauan tindak lanjut dalam pemeriksaan. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terstruktur untuk memastikan bahwa pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang.

“Iya, jelas perlu. Di Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) masing-masing tiap satu orang wajib mengikuti diklat paling tidak dalam satu tahun. Namun, memang tidak secara spesifik satu tema tertentu. Kita ini kan lebih umum, kaitannya kembali dengan SDGs ini kan salah satu tema kecil dari lingkup pemeriksaan kita. Nah, kalau itu kita masukkan ke kinerja biasanya diklat kompetensi yang kita lakukan adalah diklat metodologi pemeriksaan yang baik. Bagaimana kita melakukan pemeriksaan kinerja, bagaimana menyusun indikator, bagaimana kita mendapatkan sampling yang memadai, kemudian bagaimana kita merumuskan laporan pemeriksaan SDGs maupun laporan lain secara baik sampai nanti kesimpulan dan rekomendasi yang baik itu seperti apa menurut standar yang telah ditentukan”

Informan Auditor BPK mengakui bahwa perlu adanya pelatihan profesional dalam proses mengaudit SDGs. Hal ini dikarenakan BPK memegang beberapa peran, termasuk sebagai pengawas yang memeriksa kepatuhan, tata kelola, dan akuntabilitas keuangan. BPK juga berfungsi sebagai penasihat yang membantu merumuskan kebijakan luar biasa selama pandemi, serta sebagai badan pemeriksa keuangan negara yang memiliki kewenangan sesuai dengan undang-undang. Dengan adanya pelatihan tersebut BPK bertanggung jawab untuk

memastikan bahwa keuangan negara digunakan seefisien mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Semua kegiatan pembangunan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya, menggunakan dana negara. Hal ini juga dibuktikan dengan pendapat informan BPK yang menyebutkan bahwa informan BPK mengetahui tantangan yang dengan memastikan waktu dan relevansi audit SDG yang tepat.

“Hal ini merupakan kendala karna kita memiliki limited waktu atau keterbatasan waktu, kita biasanya melakukan secara praktis sekitar 2-3 bulan yang seharusnya dilakukan 6 bulan atau 1 tahun. Pertama, database yang ada kaitannya dengan SDGs yang nanti kita olah yang nantinya akan mempercepat proses pemeriksaan kita. Kita juga berusaha identifikasi resiko, resiko apasiah kira-kira yang sangat mengganggu bisa dari survei, atau informasi dari media massa online ataupun pengaduan dan beberapa informasi lainnya. Hal ini yang akan diidentifikasi mana yang relevan dengan permasalahan kita dalam menentukan indikator apa yang kita gunakan. Kita banyak melibatkan sumber informasi, dengan begitu dapat kita optimalkan”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari segi teknis dalam mengevaluasi masalah, mengatasi tantangan dengan adanya pelatihan professional sudah diterapkan dan dijalankan oleh Auditor BPK. Walaupun beberapa jawaban auditor BPK ada yang sama itu berarti telah menandakan bahwa Auditor BPK telah mampu bekerja sama satu sama lain dalam mengatasi permasalahan yang ada serta membuat kemajuan bagi BPK itu sendiri.

Tantangan Politik dan Kesempatan Auditor dalam Mengatasi Tantangan yang Terjadi

Segi politik menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dikaji oleh informan Auditor BPK. Informan Auditor BPK menjelaskan bahwa politik itu berkaitan dengan kekuasaan dan sangat penting bagi eksekutif pengelola daerah. Dalam peningkatan SDGs khususnya kemiskinan juga dipandang dalam sesuatu yang harus diperiksa. Sebagai auditor yang sudah independen terkait politik tidak akan terlalu berpengaruh dalam hal pemeriksaan dan juga selalu meningkatkan kualitas pemeriksaan atas audit yang berbasis resiko dan mengembangkan pemeriksaan yang dilakukan.

“Kita hidup di Indonesia, kita pasti terkait dengan faktor politik yang mana politik itu berkaitan dengan kekuasaan dan kepentingan yang sangat melekat bagi eksekutif sebagai pengelola daerah serta evaluasi dan kebijakan yang dilakukan oleh legislatif. Pasti kita tidak terlepas dari itu, cuma dari kita salah satu nilai yang dipegang yaitu profesionalitas kita sebisa mungkin mengeliminir itu dalam artian kita tidak akan terjebak dalam beberapa partai, misalnya hal ini terkait dengan partai ini yang akan menguntungkan partai ini, kita akan kembali kepada tujuan selama memang kegiatan atau program kaitannya dengan SDGs khususnya kemiskinan memang kita pandang itu sebagai sesuatu yang bagus, relevan, maka itu yang akan kita periksa. Misalnya, program ini dari partai ini maka kita tidak akan terjebak pada situasi politik, siapapun yang memegang kekuasaan, partai apapun yang mayoritas kita memang akan memeriksa satu hal. Dengan begitu, tidak akan berpengaruh ke independensi auditor BPK”

Auditor BPK juga menyatakan bahwa memahami dan menggunakan sumber daya yang ada merupakan cara untuk mengatasi tantangan SDGs dalam segi politik. Walaupun masih tergolong baru, hal ini tidak mempengaruhi auditor BPK dalam menyajikan laporan yang terintegrasi, jika dari level atas mampu menangani masalah tersebut, sampai ke level bawah pun juga bisa menangani masalah yang dihadapi. Dengan memanfaatkan hasil pemeriksaan itu juga, kinerja BPK perlu terus ditingkatkan dan hasilnya harus dapat diukur secara jelas sehingga masyarakat bisa terlepas dari kasus kemiskinan.

“Sekarang ini kita melihat SDGs ini masih di awang-awang karena masih tergolong baru. Itu mau tidak mau menjadi tantangan bagi kita selama ini karena kebetulan kita tidak hanya terkait dengan SDGs ini yang ada 17 tujuan yang rata-rata masalahnya sama dari segi pengertian terminologi dan indikator apa yang bisa diturunkan sampai level pelaksanaan paling bawah. Kalau dari internal kita dari level pimpinan berusaha untuk mengantisipasi itu, dan paling tidak kita juga harus paham”

“Dengan memanfaatkan pemeriksaan BPK perlu terus ditingkatkan kualitasnya dan evaluasinya harus lebih jelas agar keuangan negara dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya dan mencapai tujuan negara sehingga bisa mengurangi kemiskinan.”

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada saat ini auditor BPK yang menjadi tenaga ahli dalam penanganan masalah tantangan BPK di segi politik sangat memahami dan sependapat satu dengan yang lainnya. Hal ini bisa membantu memecahkan masalah yang ada dari bentuk laporan apapun yang didapat.

Menanggapi Audit SDG dengan menggunakan Komunikasi yang Lebih Baik

Informan Audit SDGs menjelaskan bahwa dalam melakukan proses pengauditan, pihak BPK selalu mengupayakan komunikasi yang baik dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP tersebut memiliki standar nilai yang tinggi dalam proses penyampaian dan mengetahui betapa pentingnya tindak lanjut serta keputusan apa yang akan dibuat nantinya. Informasi- informasi BPK itu bersifat terbuka dan terkait dengan SDGs sehingga bisa diakses oleh pihak manapun.

“Iya, itu yang selama ini kita lakukan dimana kita selalu melaporkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) itu kita punya standar yang tinggi didalam proses penyampaian dan kita selalu berusaha sampaikan dan tidak hanya yang berkaitan dengan SDGs siapa yang berhak menerima. Dari pihak eksekutif kita mengharuskan yang menerima adalah pimpinan tertinggi seperti kepala daerah, gubernur atau wakil gubernur sehingga kita akan melakukan komunikasi kira-kira dihari apa sehingga memang beberapa hal dalam forum itu kita menyampaikan betapa pentingnya informasi LHP ini dan betapa pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi ini terhadap pemerintah daerah lakukan. Informasi ini juga tersedia untuk umum karena kita juga berada pada koridor undang-undang keterbukaan”

“Ada LHP yang mesti kita keluarkan, LHP dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tingkat provinsi serta oleh kementerian atau lembaga terkait. Secara esensial, LHP adalah evaluasi akhir terhadap kinerja pemerintahan dalam suatu periode, baik itu ditingkat pusat, daerah, maupun lembaga terkait disetiap tingkatan administrasi pemerintahan. Jika publikasi pada LHP dilakukan penundaan sebulan ataupun dua bulan akan berdampak yang sangat besar terhadap kinerja”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi yang baik dapat meningkatkan implementasi SDG ke arah yang lebih baik juga. Kasus penundaan di minimalisir dan selalu melaporkan Laporan Hasil Pemeriksaan secara tepat waktu. Semua bersifat fleksibel dan bisa diakses oleh siapapun sehingga secara publik bisa mengetahui kinerja yang dilakukan oleh Auditor BPK dengan melihat aspek-aspek yang telah ditetapkan.

Kolaborasi Antara Pemangku Kepentingan dan BPK dalam Menuntaskan Tantangan Yang Ada

Informan Auditor BPK menjelaskan bahwa BPK dan pihak pemangku kepentingan harus bekerja sama satu dengan yang lainnya. Banyaknya keterbatasan Auditor BPK dalam menghadapi tantangan kolaborasi membuat auditor BPK harus bekerja sama dengan berbagai

pihak, serta banyaknya auditor BPK yang sudah memiliki usia lanjut membuat auditor BPK tersebut susah untuk belajar atau memahami data yang telah disajikan oleh pemangku kepentingan.

“Pasti, kalau ini jelas tantangan karena ketika kita bicara terkait dengan pemeriksaan kinerja khususnya SDGs dan khususnya kemiskinan disitu ada pihak seperti pemerintah daerah dia juga melakukan bukan pemeriksaan terhadap penyediaan data, contohnya BPS (Badan Pusat Statistik), dia kan melakukan semacam proses penelitian dan pengumpulan data atau untuk mempublikasikan capaian-capaian dari pemerintah misalnya tingkat pengangguran, dll kan itu yang punya datanya BPS. Disatu sisi, BPS itu bukan entitas pemeriksaan kita, kita berkomunikasi dengan BPS baik secara formal maupun informal. Kedua, kaitan dengan Bank Indonesia, informasi-informasi terkait dengan kredit, fasilitas, pinjaman, dll yang berkaitan dengan ekonomi produktif. Kalau kemiskinan ini sebenarnya ada dua yaitu meningkatkan pendapatan dan mengurangi belanja”.

“Kita berkolaborasi dengan beberapa pemangku kepentingan yang sejenis, seperti pihak statistik yang telah menyediakan data-data dari tingkat kemiskinan sehingga kita bisa mengetahui sebelum mengambil keputusan”

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa dampak dari adanya kolaborasi auditor BPK dengan pihak pemangku kepentingan ini akan sangat membantu apalagi tim ahli auditor BPK berasal dari latar belakang pendidikan akuntansi dan telah memiliki jam terbang dan pengalaman yang tinggi dan juga bisa dalam memahami laporan data yang diolah secara maksimal dan baik”.

Pembahasan Penelitian

Potensi Tantangan Audit SDGs yang Dilakukan Oleh BPK Berdasarkan Kriteria Standar Relevansi

Indikator kelembagaan terdapat sebuah keterkaitan dari potensi tantangan Audit SDGs dari kriteria standar relevansi yaitu terbatasnya kapasitas dan fleksibilitas BPK untuk menangani seluruh rangkaian SDGs dalam waktu yang terbatas. Keterkaitan tersebut berupa terdapatnya tantangan yang lebih spesifik terkait sumber daya yang tersedia di personal maupun sumber daya yang terkait pada waktu. Hal ini juga berkaitan dengan keterbatasan kompetensi sumber daya itu sendiri. Keterbatasan itu juga mampu dievaluasi ke arah pengembangan dan juga bekerja sama dengan unit-unit kerja yang terkait kearah yang lebih baik.

Selanjutnya, masih pada indikator kelembagaan terdapat kaitan dari potensi tantangan audit SDGs dari kriteria standar relevansi yaitu audit SDGs yang dilakukan BPK dianggap terlalu kritis terhadap tindakan pemerintah. Hal ini diketahui ketika ada temuan seorang informan yang menyatakan bahwa dalam hubungan dalam penanggulangan kemiskinan saat ini, masyarakat dan pemerintah cenderung mengabaikan ataupun tidak peduli dengan SDGs karena SDGs ini program-programnya dari global lalu diaplikasikan ditingkat nasional. Hal ini menyebabkan program-program yang harus dijalankan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh BPK.

Indikator teknis terdapat sebuah keterkaitan dari potensi tantangan Audit SDGs dari kriteria standar pada segi relevansi yaitu terbatasnya kapasitas dan fleksibilitas BPK untuk menangani seluruh rangkaian SDGs dalam waktu yang terbatas. Keterkaitan tersebut berupa kendala yang dimiliki auditor terkait *limited* waktu atau keterbatasan waktu yang biasanya dilakukan secara praktis sekitar 2-3 bulan yang seharusnya dilakukan selama 6 bulan atau 1 tahun. Akibatnya, hal ini bisa mengganggu survey ataupun informasi yang didapat berdasarkan indikator yang telah digunakan.

Indikator komunikasi terdapat potensi tantangan Audit SDGs dari kriteria standar pada segi relevansi yaitu laporan dan temuan audit BPK tidak dikomunikasikan secara memadai kepada khalayak yang relevan. Keterkaitan yang didapatkan berdasarkan temuan adalah informan BPK menjelaskan bahwa auditor mengharuskan yang menerima laporan pemeriksaan adalah pimpinan tertinggi seperti kepala daerah, gubernur, wakil gubernur. Akan tetapi, saat ini walaupun laporan tersebut telah dibuat dan dipublikasikan ke pimpinan tertinggi, namun belum dipublikasikan secara maksimal kepada masyarakat umum sehingga menyebabkan laporan tersebut tidak dikomunikasikan secara memadai kepada khalayak.

Potensi Tantangan Audit SDGs yang Dilakukan Oleh BPK Berdasarkan Kriteria Standar Legitimasi

Indikator kelembagaan terdapat potensi tantangan Audit SDGs dari kriteria standar legitimasi yaitu BPK dipandang telah keluar dari perannya dan menjadi pembuat kebijakan. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari pihak BPK telah berusaha memberikan rekomendasi untuk perbaikan sehingga benar-benar pelaksanaan tujuan dari SDG ini tercapai. Rekomendasi tersebut berupa program prioritas dan pelaksanaan yang ada disana. Saat ini pihak BPK telah mengawal masalah kreativitas dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Indikator kolaborasi terdapat potensi tantangan Audit SDGs dari kriteria standar legitimasi yaitu audit SDG dirasakan oleh pihak-pihak diluar BPK untuk mengalihkan sumber daya dari usaha yang lebih penting. Keterkaitan dari temuan tersebut adalah dengan adanya audit SDG saat ini telah dirasakan oleh banyak pihak seperti BPS dimana mengkomunikasikan secara formal maupun informal tentang capaian-capaian pemerintah saat ini seperti melakukan semacam proses penelitian dan pengumpulan data misalnya tingkat pengangguran. Selanjutnya, Bank Indonesia yang berkaitan dengan tingkat ekonomi yang produktif bagi masyarakat seperti kredit, fasilitas perbankan dan pinjaman. Hal ini memungkinkan dapat meminimalisir tingkat kemiskinan serta dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat.

Potensi Tantangan Audit SDGs yang Dilakukan Oleh BPK Berdasarkan Kriteria Standar Kredibilitas

Indikator teknis terdapat potensi tantangan Audit SDGs dari kriteria standar kredibilitas yaitu kurangnya kualitas laporan audit mengakibatkan rendahnya penerimaan oleh auditee. Keterkaitan tersebut berupa teknis atau ukuran pemeriksaan yang indikator-indikatornya belum efektif yang menyebabkan kurangnya kualitas laporan audit. Dengan begitu, nantinya akan dilakukan perbaikan atas beberapa indikator yang belum tercapai, maka itu nantinya yang akan dijadikan temuan pemeriksaan dan kemudian diberikan rekomendasi agar indikator tersebut dapat terpenuhi, dimana nantinya dibutuhkan pendidikan profesional bagi auditor BPK untuk mengatasi kebutuhan kapasitas teknis dalam audit SDG, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) masing-masing tiap satu orang wajib mengikuti diklat dalam satu tahun.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Dari temuan penelitian yang telah dilakukan mengenai Eksplorasi Tantangan BPK Terkait Audit SDGs (Studi Kasus BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat), diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Pemahaman auditor BPK dengan struktur kelembagaan telah maksimal, namun tantangan yang sangat menonjol ditemukan yaitu dari segi sumber daya di personal maupun sumber daya terkait waktu dan berkaitan dengan keterbatasan kompetensi. Strategi yang dilakukan oleh auditor BPK dalam mengatasi tantangan yang ada yaitu SDGs ini diperiksa menggunakan pemeriksaan kinerja, melakukan workshop dan melakukan kerjasama dengan diklat untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan konsep SDGs.
2. Segi teknis dalam mengevaluasi masalah, mengatasi tantangan dengan adanya pelatihan professional sudah diterapkan dan dijalankan oleh auditor BPK. Pelatihan yang diterapkan dikarenakan adanya keterbatasan waktu Strategi yang dilakukan oleh auditor BPK dalam mengatasi tantangan yang ada yaitu dengan membangun indikator-indikator tertentu dengan cara mengkomunikasikan dan mendiskusikan dengan pihak luar.
3. Auditor BPK yang menjadi tenaga ahli dalam penanganan masalah tantangan BPK di segi politik sangat memahami dan sependapat satu dengan yang lainnya. Hal ini bisa membantu memecahkan masalah yang ada dari bentuk laporan apapun yang didapat. Auditor BPK tidak begitu menemukan tantangan dalam bidang politik karena auditor selalu memegang nilai independensi, integritas dan profesionalitas.
4. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan implementasi SDG ke arah yang lebih baik juga. Kasus penundaan diminimalisir dan selalu melaporkan Laporan Hasil Pemeriksaan secara tepat waktu. Semua bersifat fleksibel dan bisa diakses oleh siapapun sehingga secara publik bisa mengetahui kinerja yang dilakukan oleh Auditor BPK. Strategi yang dilakukan yaitu melaporkan laporan hasil pemeriksaan secara tepat waktu dan tidak adanya penundaan.
5. Kolaborasi auditor BPK dengan pihak pemangku kepentingan ini akan sangat membantu seperti pihak BPS, Bank Indonesia, Kementerian Sosial dan Perbankan. Namun, sekaligus juga dapat menjadi tantangan seperti adanya pihak pemerintah daerah misalnya BPS yang juga melakukan penelitian dan pengumpulan data yang mana bukan entitas pemeriksaan BPK. Strategi yang dilakukan yaitu menjaga proses komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan beberapa instansi yang kita butuhkan.

Keterbatasan

Penelitian ini tidak lepas dari kekurangan dan keterbatasan, dimana penelitian ini hanya memiliki rentang waktu penelitian kurang lebih sebulan, maka diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk menambah waktu penelitian agar memperdalam dan memperluas informasi yang dibutuhkan.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan yang ada, peneliti menyarankan bagi penelitian selanjutnya untuk menambah waktu penelitian sehingga bisa mendapatkan informasi lebih banyak dan lebih mendalam. Dengan adanya informasi yang lebih banyak membuat penelitian selanjutnya dapat mengembangkan pembahasan lebih detail.

DAFTAR PUSTAKA

Abhayawansa, A. A. (2021). *Connecting the COVID-19 Pandemic, Environmental, Social and Governance (ESG) Investing and Calls for Harmonisation' of Sustainability Reporting. Critical Perspectives on Accounting.* (<https://doi.org/10.1016/j.cpa.2021.102309>).

- Arens. (2011). *asa Audit dan Assurance, Alih bahasa Amir Abdul Jusuf*. Salemba Empat, Jakarta.
- Bebbington, J. (2014). *Accounting and sustainable development: An exploration*. Accounting, Organizations and Society: Volume 39, Issue 6, August 2014, Pages 395-413 <https://ideas.repec.org/a/eee/aosoci/v39y2014i6p395-413.html>.
- Bebbington., J. (2018). *Advancing research into accounting and the UN Sustainable Development Goals*. Department of Accounting and Finance, Lancaster University Management School, Lancaster University, Lancaster, UK.
- Bebington, J. (2017). *Advancing research into accounting*. Department of Accounting, Birmingham Business School, University of Birmingham.
- Bourmistroy, A. (2002). *Exploring Accounting And Democratic Governance A Study Comparing A Norwegian And Russia Country*. Financial Accounting Of Management November 2002.
- Box, R. C. (2018). *New Public Management and Substantive Democracy*. University Of Nebraska at Omaha.
- BPS. (2020). *Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2017/02/01/9a002f0067c89e511f042c13/kajian-indikator-lintas-sektor--potret-awal-tujuan-pembangunan-berkelanjutan--sustainable-development-goals--di-indonesia.html>.
- Bradbury, M. (2015). *The association between accounting performance and constituent response in political markets*. New Zealand: University of Auckland, Auckland.
- Brodjonegoro. (2017). *17 Arah Pembangunan Berkelanjutan ditetapkan*. Retrieved from www.kontan.com: <http://nasional.kontan.co.id/news/17->.
- Brown, J. (2009). *Democracy, sustainability and dialogic accounting technologies: Taking pluralism seriously*. School of Accounting and Commercial Law, Victoria University of Wellington.
- Cordery, C. (2022). *Public sector audit and the state's responsibility to "leave no-one behind": The role of integrated democratic accountability*. Birmingham Business School, Birmingham University, Birmingham, UK.
- Cordory, C. J. (2015). *Public Sector Audit*. Vol.7 No.1, February 2015: The Boundaries in Financial and Non-Financial Reporting.
- Costa Rica SAI. (2018). *Bridge to Development*. <https://intosaijournal.org/journal-entry/sai-costa-rica-idi-unite-assess-bridge-development/>.
- Cuckston, T. (2018). *Framing sustainable development challenges: accounting for SDG-15 in the UK*. Birmingham Business School, University of Birmingham, Birmingham, UK.
- Denzin K. N. Lincoln S.Y. (1994). *Hand Book of Qualitative Research*. New Delhi: Sage Publications.
- Denzin, N. K. (1998). *The Landscape of qualitative Research: Theories and issues*. Thousand Oaks: Sage.
- Denzin, N. K. (2009). *Handbook of Qualitative research. (Edisi Bahasa Indonesia: diterjemahkan oleh Rinaldi, dkk)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dr. Anik Yuesti, N. L. (2020). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK*. Badung Bali : CV. Noah Aletheia.
- Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, M. (2020). *PEDOMAN TEKNIK PENYUSUNAN RENCANA AKSI - EDISI II TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)*. Kedepatian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, .

- English, L. (2007). *Performance Audit Of Australian Public Private Partnerships: Legitimising Government Policies Or Providing Independent Oversight?* *Financial Accountability & Management*, 23(3), August 2007, 0267-4424.
- Ghozali, I. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guillan Montero. (2013). *rom principles to change in practices: Do transparency and participation in Supreme Audit Institutions (SAIs) work for improving accountability*. 3rd Global Conference on Transparency Research (Paris, October 24-26).
- Habib, A. (2016). *Penentu lag laporan audit: Sebuah meta-analisis*. Sekolah Akuntansi, Universitas Massey: Diterima: 19 Agustus 2016 Direvisi: 17 Mei 2018 Diterima: 24 Juni 2018.
- Hoskin, R. C. (2020). *SDG 13 and the entwining of climate and sustainability metagovernance: an archaeological–genealogical analysis of goals-based climate governance*. Department of Accounting, University of Birmingham, Birmingham, UK.
- IBP. (2018). *Indonesia: Kredibilitas Anggaran dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs*. https://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Indonesia-Kredibilitas-Anggaran-dan-Tujuan-Pembangunan-BerkelanjutanSDGs_V2.pdf.
- inews.co. (2021). *Data Berbasis SDGS*. <https://www.inews.id/news/nasional/data-berbasis-sdgs-jadi-panduan-praktis-pembangunan-desa-agar-lebih-maju>.
- Karlsson-Vinkhuyzen. (2018). *The Rule of Law as a Global Public Good: Exploring Trajectories for Democratizing Global Governance Through Increased Accountability In: Cogolati S and Wouters J (eds) The Commons and a New Global Governance*. Cheltenham: Edward Elgar 130-`159.
- Kasmir. (t.thn.). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Pertama Cetakan Kesebelas. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Le Blanc. (2015). *Towards integration at last? The sustainable development goals as a network of targets*. *Sustainable Development*. 23(3), pp.176-187.
- LHP BPK Sumatera Barat. (t.thn.). Diakses Tahun 2023.
- Montero, G. (2019). *The role of external audits in enhancing transparency and accountability for the Sustainable Development Goals*. Department of Economic & Social Affairs.
- Nirmalasari. (2018). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Audit Complexity Terhadap Ketepatan Waktu Audit Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015*. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol.3 No.2.
- Nurkholis, & K. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. UB Press.
- PBB. (2016). *Sidang Umum PBB*. <https://sdgs.bappenas.go.id/tag/sidang-umum-pbb/>.
- Rahadian. (2016). *Stategi Pembangunan Berkelanjutan*. Riau: repository University Of Riau.
- RPJMD. (2019). *Payung Hukum dan Kebijakan yang Mendukung TPB*. Kementrian PPN/ Bappenas.
- Sefriani. (2010). *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sobkowiak, M. C. (2020). *Framing sustainable development challenges: accounting for SDG-15 in the UK*. *Account Audit. Account*. head-of-print(ahead-of-print).
- Subandi. (2017). *Achieving SDGs in Indonesia: Strategy and Implementation*. Retrieved from www.fikal.kemenkeu.go.id.
- Sugiyono. (2019). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.

- Thompson, R. (2023). *Management of Severe and Crusted Scabies*. Springer International Publishing.
- Titsworth, S. &. (2006). *When Supreme Audit Institutions engage with civil society*. U4 PRACTICE2013: 5 Carolina Cornejo Aranzazu Guillan Renzo Lavin INSIGHT.
- World Bank. (2021). *The World Bank Group's Twin Goals, the SDGs, and the 2030 Development Agenda*. <https://www.worldbank.org/en/programs/sdgs-2030-agenda>.